

Editor:

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D ., APU

**SINERGI, PEMBIAYAAN, PERAN
MASYARAKAT, DAN DAYA SAING DALAM
PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL**

Diterbitkan Oleh :

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan DIAN RAKYAT

2016

**SINERGI, PEMBIAYAAN, PERAN
MASYARAKAT, DAN DAYA SAING DALAM
PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL**

Editor:

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D ., APU

Penulis:

Achmad Sani Alhusain, SE.,MA.

Ariesy Tri Mauleny, S.Si., ME

Nidya Waras Sayekti, SE, MM.

Lisnawati, S.Si., MSE.

Pusat Penelitian

Badan Keahlian Dewan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

2016

Judul:

Sinergi, Pembiayaan, Peran Masyarakat dan Daya Saing
dalam Penguatan Konektivitas Nasional

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Jumlah Halaman Isi: 177 hal
Ukuran Bersih Buku: 15,5 x 23 cm
ISBN: 978-602-60366-0-5
Cetakan Pertama, 2016

Penulis:

Achmad Sani Alhusaini, SE.,MA
Ariesy tri Mauleny, S.Si,ME
Nidya Waras Sayekti, SE, MM
lisnawati, S.Si MSE

Editor:

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE,Ph.D.,APU

Desain Sampul:

Bambang RS

Tata Letak:

Ilham Akbar, Fajar Dwiyanto

Board Editor:

Pitan Daslani

Diterbitkan Oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2016
Gedung Nusantara I Lt. 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

PT. DIAN RAKYAT Anggota IKAPI No. 161/DKI/66
Jl. Rawagirang no. 8, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930
Telp. (021) 4604444/4606666 Fax. (021) 4609115
www.dianrakyat.co.id

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**Pasal 72**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terbitnya buku yang berjudul **“Sinergi, Pembiayaan, Peran Masyarakat, dan Daya Saing dalam Penguatan Konektivitas Nasional”** yang disusun oleh peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Hasil analisis berupa gagasan dan pemikiran serta pengalaman empiris yang dituangkan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam menguatkan program konektivitas nasional dan menopang perekonomian Indonesia. Pendekatan analisis dilakukan tidak hanya berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan namun juga berdasarkan *review* berbagai kajian terkait serta analisis empiris berdasarkan studi-studi sebelumnya.

Struktur buku terdiri atas 4 (empat) bagian tulisan yang memiliki keterkaitan yang baik untuk memperkaya pembahasan mengenai kebijakan pembangunan di Indonesia dari berbagai perspektif. Saya sampaikan apresiasi kepada masing-masing penulis yang terdiri dari Achmad Sani Alhusain, Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, dan Lisnawati untuk tulisannya yang beragam warna mengenai kebijakan

pembangunan, pembiayaan infrastruktur, peran masyarakat dan daya saing khususnya yang terkait dengan penguatan konektivitas nasional di Indonesia, baik itu dukungan pemerintahan, sektor swasta maupun masyarakat.

Saya sampaikan apresiasi kepada rekan-rekan peneliti dan terima kasih kepada **Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D ., APU** yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya sebagai editor buku ini. Kepada penerbit disampaikan penghargaan atas kerja samanya dalam penerbitan bersama dengan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Besar harapan saya, buku ini akan bermanfaat, bukan saja dalam perumusan rancangan undang-undang khususnya namun juga dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Jakarta, Oktober 2016

Kepala Pusat Penelitian

Badan Keahlian DPR RI

Dr. Indra Pahlevi

PROLOG

Secara nasional, pembangunan daerah di tahun 2015 masih dihadapkan pada permasalahan utama yaitu masih tingginya kesenjangan antarwilayah, yaitu antara Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali, antara wilayah barat dan timur Indonesia, antara pusat-pusat pertumbuhan utama dan antara kota-kota besar dan metropolitan dengan wilayah perdesaan. Kesenjangan yang dimaksud terutama kesenjangan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi (*social economic welfare*).

Akibat dari adanya kesenjangan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi antar daerah dan wilayah tersebut menyebabkan meningkatnya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Walaupun masalah ketimpangan ini bukan hanya monopoli Indonesia, tingkat ketimpangan pendapatan Indonesia relative yang tertinggi seperti halnya Tiongkok, dan India (baca ADB, 2012; Thomas, 2013).

Bahkan studi Bank Dunia baru-baru ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menguntungkan warga terkaya 20 persen, tetapi 80 persen populasi tertinggal di belakang. Diperkirakan sekitar 10 persen orang terkaya Indonesia menguasai 77 persen kekayaan nasional. Bahkan, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai separuh lebih atau tepatnya 50.3 persen dari kekayaan di negeri ini (Kompas, 11 Desember 2015).

Keadaan ini berbanding terbalik dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam yang berhasil

menurunkan atau mestabilkan koefisien Gini di negaranya. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini tidak berbanding lurus dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Selain masalah ketimpangan, masalah yang juga perlu mendapat perhatian yakni masalah kemiskinan, pengangguran dan belum optimalnya pembangunan di daerah-daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau terluar, dan perdesaan di satu sisi, serta masih lebih besarnya akumulasi investasi di wilayah-wilayah Jawa-Bali dan sebagian Sumatera di sisi lain. Masalah-masalah ini menunjukkan masih besarnya tantangan Indonesia dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Timbulnya masalah tersebut di atas antara lain disebabkan pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam dan sosial budaya yang dimiliki belum optimal dilakukan. Selain itu juga disebabkan upaya pengembangan kawasan-kawasan strategis yang dapat menyebarkan pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya dan pembangunan ekonomi lokal dan daerah belum mampu dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, upaya-upaya penguatan terhadap sinkronisasi dan sinergi antarsektor, antarpelaku, dan antara pusat dan daerah merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar sasaran pengurangan kesenjangan antarwilayah tersebut dapat dicapai.

Salah satu upaya yang mutlak perlu mendapat perhatian menyikapi masalah-masalah tersebut yakni melalui pembangunan konektivitas nasional. Dalam pembangunan konektivitas nasional dimaksud berbagai aspek atau faktor mutlak perlu mendapat

perhatian. Diantara berbagai faktor tersebut, paling tidak empat faktor yang terdiri dari faktor sinergitas, pembiayaan, peran masyarakat dan daya saing tidak dapat diabaikan.

Buku ini ditujukan untuk membahas dan mendiskusikan ke empat faktor di atas. Disamping itu buku ini juga mendiskusikan hambatan dan permasalahan yang timbul dalam perkembangan pembangunan masa kini dan dampaknya terhadap perekonomian di masa yang akan datang. Secara sistimatis ke empat faktor tersebut ditulis sebagai berikut.

Bagian pertama mengungkap tentang sinergi pembangunan pusat dan daerah menuju konektivitas nasional. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep pembangunan dan konektivitas, kebijakan pembangunan konektivitas nasional dan sinergi pembangunan dengan segala hambatan dan tantangannya. Kemudian di bagian kedua didiskusikan mengenai kebijakan pembiayaan pembangunan untuk penguatan konektivitas nasional. Isu strategis yang dibahas dalam bagian ini antara lain menyangkut kebijakan pembangunan dan pembiayaan infrastruktur, alternatif dan skema pembiayaan, serta potensi dan kendala yang dihadapi dalam pembiayaan infrastruktur. Bagian ini juga mengemukakan hasil studi lapangan terkait pembangunan dan pembiayaan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, bagian ketiga buku ini membahas mengenai peran masyarakat dalam mendukung konektivitas nasional. Dalam bagian ini dibahas tidak saja peran masyarakat secara umum, namun juga diungkapkan catatan lapangan menyangkut peran masyarakat dalam mendukung konektivitas khususnya di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung. Bagian ke empat diberikan pembahasan dan diskusi menyangkut bagaimana pembangunan konektivitas nasional dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Akhirnya, untuk merangkum analisis dan pembahasan dari seluruh bagian tersebut diberikan epilog dari buku ini.

Apresiasi yang tinggi dan ucapan selamat kepada Tim Penulis Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI atas terbitnya buku ini. Buku ini diyakini dapat memberikan inspirasi dan masukan penting bagi para pengambil kebijakan, terutama pihak legislatif. Buku ini juga diyakini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca yang ingin mendalami pengetahuan tentang kebijakan pembangunan dalam upaya penguatan konektivitas nasional.

Selamat Membaca.

Editor.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PROLOG	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAGIAN KESATU

SINERGI PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH MENUJU KONEKTIVITAS NASIONAL

<i>Achmad Sani Alhusain</i>	1
1. PENDAHULUAN	2
2. KONSEP PEMBANGUNAN DAN KONEKTIVITAS	5
2.1. Konsep Pembangunan.....	5
2.2. Konektivitas.....	9
2.3. Pembangunan dan Konektivitas	13
3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL .	16
4. SINERGI PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH.....	23
4.1. Perencanaan Pembangunan Pusat.....	23
4.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	28
5. HAMBATAN DAN TANTANGAN SINERGI PEMBANGUNAN	31
5.1. Hambatan.....	31
5.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	33
6. PENUTUP.....	38
DAFTAR PUSTAKA	41

BAGIAN KEDUA

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MENUJU KONEKTIVITAS NASIONAL

<i>Ariesy Tri Mauleny</i>	45
1. PENDAHULUAN	46
2. MENUJU INDONESIA TERINTEGRASI.....	49
2.1. Kondisi dan Tantangan Geografis.....	49
2.2. Pembangunan Ekonomi Regional dan Konektivitas ..	51
2.3. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur.....	53
3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR.....	58
3.1. Pembiayaan Infrastruktur dan Keterbatasan Fiskal	58
3.2. Skema Pembiayaan Infrastruktur.....	66
4. POTENSI DAN KENDALA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR...	72
4.1. Potensi Pembiayaan Infrastruktur	72
4.2. Kendala Pembiayaan Infrastruktur	74
5. STUDI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH.....	76
5.1. Studi terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..	76
5.2. Studi terhadap Provinsi Sulawesi Selatan	79
6. PENUTUP.....	81
DAFTAR PUSTAKA	85

BAGIAN KETIGA

PERAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KONEKTIVITAS NASIONAL

<i>Nidya Waras Sayekti</i>	89
1. PENDAHULUAN	90
2. KONEKTIVITAS DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	92
2.1. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..	92
2.2. Konektivitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..	97

2.3. Sistem Transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100
3. PERAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KONEKTIVITAS NASIONAL	109
4. PENUTUP	116
DAFTAR PUSTAKA	120

TULISAN KEEMPAT

**PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL DALAM
MENINGKATKAN DAYA SAING PEREKONOMIAN NASIONAL**

<i>Lisnawati</i>	123
1. PENDAHULUAN	124
2. PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL	127
3. DAYA SAING INFRASTRUKTUR DI INDONESIA	138
4. PENUTUP	145
DAFTAR PUSTAKA	147
EPILOG	149
INDEKS	154
BIOGRAFI EDITOR	157
BIOGRAFI PENULIS	159

DAFTAR TABEL

Bagian Kesatu

Sinergi Pembangunan Pusat Dan Daerah Menuju Konektivitas Nasional

Tabel 1. Keterkaitan Konektivitas Nasional Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	25
Tabel 2. Keterkaitan Konektivitas Nasional Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	29

Bagian Kedua

Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Menuju Konektivitas Nasional

Tabel 1. Perkembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur, 2014-2015	55
Tabel 2. Pembiayaan Infrastruktur dalam APBN dan Persentasenya terhadap PDB, 2005-2013	60
Tabel 3. Pembiayaan dan Perkembangan Defisit APBN, 2010-2016	62
Tabel 4. Anggaran Infrastruktur per Instansi, 2010-2015	63
Tabel 5. Anggaran Infrastruktur Daerah, 2014-2016	64
Tabel 6. Investasi Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur, 2010-2013	65

Bagian Ketiga

PERAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KONEKTIVITAS NASIONAL

Tabel 1. Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung...	92
Tabel 2. Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Beltung Tahun 2013	93
Tabel 3. Data Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Beltung Tahun 2013	103

DAFTAR GAMBAR

Bagian Kedua

Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Menuju Konektivitas Nasional

Ariesy Tri Mauleny

Gambar 1. Struktur Transaksi dan Proses Pelaksanaan KPS... 68

Bagian Keempat

Pembangunan Konektivitas Nasional Dalam Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Nasional

Lisnawati

Gambar 1. Realokasi Subsidi BBM..... 128

EPILOG

Konektivitas nasional merupakan salah satu sasaran pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen pembangunan jangka panjang 2005-2025 yang ditetapkan dalam UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 yaitu terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Sasaran tersebut kemudian dirinci lagi dengan adanya dokumen perencanaan pendukung yaitu Dokumen MP3EI.

Selain Undang-undang di atas, ketetapan lain yang terkait dengan sasaran tersebut yakni Perpres No.2 Tahun 2005 tentang RPJMN 2015-2019. Dalam Perpres ini dinyatakan bahwa pembangunan difokuskan untuk mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Oleh karena itu, peran dan fungsi pembangunan konektivitas nasional diperuntukkan sebagai upaya pencapaian perekonomian yang berdaya saing dan kompetitif. Upaya ini menjadi penting karena selama ini yang menjadikan perekonomian tidak kompetitif dan kurang berdaya saing salah satunya disebabkan belum optimalnya konektivitas nasional.

Sebagai langkah konkrit untuk mengoperasionalkan pembangunan konektivitas nasional, peningkatan belanja infrastruktur ditingkatkan dalam APBN. Perhatian terhadap

pentingnya konektivitas ini juga ditetapkan dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah. Dengan demikian, isu strategis konektivitas menjadi komitmen tidak saja bagi pemerintah pusat, melainkan juga daerah.

Dalam pelaksanaan pengembangan konektivitas nasional masih dijumpai berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi tidak saja pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam tahap pelaksanaannya. Masalah-masalah dimaksud antara lain menyangkut perizinan investasi dan berbagai masalah klasik seperti pendanaan, penegakkan aturan dan faktor lingkungan fisik. Untuk pemerintah daerah, permasalahannya adalah keterbatasan potensi sumber daya terutama keterbatasan anggaran. Persoalan lain yang dihadapi adalah persoalan pembebasan lahan serta peruntukan lahan disamping masalah tumpang tindihnya kewenangan terkait dengan regulasi. Dengan demikian sinergitas menjadi mutlak untuk diperhatikan dalam mencapai tujuan pengembangan konektivitas nasional.

Dalam konteks pembangunan dan pembiayaan infrastruktur perlu difokuskan dan disinergikan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah. Hal ini ditujukan untuk mengurangi biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat mendorong daya saing serta mempercepat distribusi produk. Pembangunan infrastruktur daerah harus bersinergi dengan program prioritas nasional.

Dalam pembangunan konektivitas nasional, pembiayaan pembangunan infrastruktur tidak harus dipenuhi oleh pemerintah pusat melalui APBN atau pemerintah daerah melalui APBD, tetapi juga diperlukan keterlibatan BUMN, BUMD dan sektor swasta

lainnya. Dengan demikian pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun BUMN, BUMD dan swasta yang memerlukan kesepahaman dan kerjasama termasuk dukungan masyarakat.

Pola kemitraan pemerintah dan swasta sangat terbuka pada dua periode kepemimpinan terakhir. Selain mengupayakan ruang pembiayaan dalam APBN/D yang cukup bagi pembangunan infrastruktur melalui perbaikan fiskal, efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan negara. Pemerintah juga dituntut untuk handal dalam membuka ruang investasi dimana pihak perbankan baik nasional dan internasional dapat berpartisipasi dengan tidak melupakan perbankan lokal untuk tumbuh dan berkembang.

Alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui kemitraan pemerintah dan swasta dapat dibagi menjadi tiga alternatif berdasarkan kelayakan proyek yaitu proyek yang layak secara ekonomi dan finansial, proyek layak secara ekonomi namun dengan finansial marjinal, dan terakhir proyek yang memiliki kelayakan proyek secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial.

Pembangunan konektivitas sangat dibutuhkan dalam pengembangan suatu wilayah untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah. Melalui pembangunan konektivitas dapat diciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah sekitarnya, sehingga pada akhirnya akan memiliki daya saing nasional dan global.

Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan

yang lebih luas. Pembangunan konektivitas nasional membutuhkan 3 komponen yang saling mempengaruhi satu sama lainnya yaitu: konektivitas fisik (*physical connectivity*), kedua, konektivitas kelembagaan (*institutional connectivity*), dan konektivitas sosial budaya (*people-to-people connectivity*). Ketiga komponen tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah kedepannya. Begitu juga dengan masyarakat sebagai aset pelaku pembangunan, peran aktifnya sangatlah dibutuhkan sehingga program pemberdayaan kapasitas yang termasuk dalam komponen konektivitas kelembagaan dapat dilaksanakan.

Pembangunan infrastruktur adalah cara yang paling tepat untuk meningkatkan daya saing nasional. Lewat infrastruktur yang terintegrasi dan berkualitas baik, seluruh wilayah akan terkoneksi sehingga memudahkan terjadinya pergerakan barang, jasa dan manusia. Dalam konteks ekonomi, atau lebih khususnya bisnis, pembangunan infrastruktur jalan akan berdampak penghematan biaya transportasi dan logistik.

Dengan transportasi dan logistik yang lebih murah, maka ongkos produksi barang dan jasa juga lebih murah, sehingga mampu bersaing dalam perdagangan internasional. Peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional melalui pembangunan infrastruktur merupakan program keenam dalam Nawa Cita yang harus diimplementasikan dalam periode kerja pemerintah sampai lima tahun ke depan.

Selanjutnya, *Blue Print* Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) harus dilaksanakan secara konsisten meskipun dengan berbagai permasalahannya. Terkait pembiayaan

infrastruktur yang besar dapat diatasi dengan adanya bank infrastruktur dan alternatif pembiayaan lainnya termasuk kemitraan pemerintah dan swasta. Namun, pemerintah perlu berhati-hati dalam menjalin kemitraan terutama dengan swasta asing. Kemitraan yang dibangun harus tetap berpegang pada nasionalisme dan keutuhan negara, menjaga nilai-nilai keadilan dan pemerataan serta sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, tak ada alasan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing sesuai amanah Nawacita tidak bisa direalisasikan.

Jakarta, Oktober 2016

Editor

INDEKS

A

Akselerasi, 8, 26
All Makassar Corporated
 (*Amacore*), 80, 83, 149
Alokasi, 64, 149
Alur Laut Kepulauan
 Indonesia (ALKI), 76, 79,
 109, 117, 149
Angkutan Umum, 149
Antar Daerah, 149
Antarwilayah, 9, 19, 25, 27, 28,
 33, 47, 51, 52, 55, 58, 77, 81,
 90, 96, 110, 113, 118, 125,
 126, 149
APBD, 15, 64, 65, 66, 73, 77, 80,
 81, 149
APBN, 15, 17, 18, 39, 50, 54, 58,
 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 72,
 74, 78, 80, 81, 82, 87, 127,
 136, 142, 149

B

Badan Pertanahan Nasional,
 31, 149
Bandara, 77, 99, 106, 107, 108,
 149
Biaya, 108, 141, 149, 150
BKPM, 31, 149
Bond, 71, 86, 149, 150

Budget Constrains, 149

BUMD, 15, 18, 26, 53, 59, 65,
 66, 68, 69, 70, 71, 73, 81, 83,
 149
BUMN, 15, 18, 26, 53, 59, 60,
 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 81,
 82, 83, 125, 126, 130, 134,
 150

C

Central Place Theory, 12, 150
Complementary, 150, 153
Cost of Project, 150

D

Daerah, 6, 15, 19, 23, 28, 29,
 30, 31, 33, 41, 43, 44, 62, 64,
 78, 80, 84, 87, 95, 96, 100,
 106, 109, 118, 121, 128, 150
Darat, 102, 150, 154
Daya Saing, 133, 144, 147, 148,
 150
Direct User, 150
Distribusi Produk, 150

E

Efisien, 16, 35, 47, 50, 55, 72,
 90, 101, 124, 126, 150

Ekonomi, 6, 9, 12, 17, 18, 20,
27, 28, 29, 36, 41, 42, 43, 45,
51, 55, 60, 64, 85, 89, 96, 123,
150, 152

Ekonomi Biaya Tinggi, 4, 37,
52, 110, 133, 150

Ekonomi Regional, 7, 37, 51,
52, 111, 139, 150

Ekonomi wilayah, 5, 28, 118,
150

Eksekutor, 53, 150

Ekspor, 35, 46, 95, 143, 150

F

Fasilitas Likuiditas

Pembiayaan Perumahan, 63,
151

Finansial, 59, 68, 69, 151

Fiskal, 17, 48, 54, 58, 59, 65, 72,
74, 77, 81, 82, 83, 109, 135,
145, 151

G

Geo Strategis Nasional, 151

Geografis, 30, 37, 46, 47, 49,
92, 111, 125, 151

Global Economic Forum, 151

Guarantee Fee, 151

H

Hambatan, 31, 32, 74, 76, 105,
151

Hutan lindung, 105, 151

I

Impor, 151

Incorporated, 15, 66, 151

*Indonesia Infrastructure
Finance*, 70, 151

Industri, 20, 151, 152

Inflasi, 94, 151

Infrastructure bond, 151

Infrastructure Fund, 82, 151

BIOGRAFI EDITOR



Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D., APU. adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR). Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1957. Gelar Sarjana diperoleh dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke jenjang *Master Degree di bidang Agricultural Development Economics* (MADE) dari *Australian National University*, Canberra, Australia pada tahun 1986. Kemudian meraih Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dari *University of Queensland*, St. Lucia, Brisbane-Australia pada tahun 1992. Tahun 1995-1996, menjadi Staf Ahli Khusus Menteri Sekretaris Negara dalam pembuatan materi Pidato Presiden RI bidang Ekonomi. Kemudian tahun 1997-2001 menjadi Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Tahun 2001-2002 menjadi Staf Ahli bidang Ekonomi, Dewan Ketahanan Nasional. Tahun 2005-2010 menjadi Deputy Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) pada Bidang Dinamika Masyarakat dan *President of Non-Align Movement for Science and Technology* (NAM), serta *Chairman of ASEAN Committee on Science and Technology* (ASEAN-COST).

Pengabdianannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi mencakup antara lain: (a) penelitian dalam bidang ekonomi pembangunan, makro ekonomi dan ekonomi internasional

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); (b) Konsultan penelitian *Asian Development Bank* (ADB), *United Nation for Economic and Social for Asia and Pacific* (UN-ESCAP), *International Labour Organization* (ILO), UNDP, UNCTAD, UNSFIR, ISEAS, ISIS dan *World Bank*; (c) Dosen dan pembimbing mahasiswa program S1, S2, dan S3, untuk mahasiswa di beberapa Universitas seperti UI, IPB, UNPAD, dan UNTAR; (d) Mitra Bestari Buletin Ilmiah Perdagangan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Jurnal Standarisasi, BSN; (e) Redaktur Jurnal Ekonomi UNTAR dan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI; (f) sejak tahun 2008 menjadi *Editorial Member of Journal of Social and Economic Science*, *International Journal of Development Research and Quantitative Techniques* dan *International Journal of Economics and Business Studies*, New York, USA; (g) Editor dari berbagai Jurnal Ekonomi; (h) Penyunting dari berbagai buku dan prosiding bertemakan ekonomi; dan (i) *Coordinator East Asian Development Network* (EADN) untuk Indonesia dan anggota *Think Tank Asian Development Bank* (ADB) sejak tahun 2010. Berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk jurnal telah diterbitkan antara lain dalam *Review of Asian Development Bank* (ADB), *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *Institute for Southeast Asian Studies* (ISEAS), ILO dan UN ESCAP. Demikian pula dengan buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh UN ESCAP, ILO, UNSFIR, UNDP dan ADB serta penerbit internasional lainnya. Alamat email yang dapat dihubungi adalah cmfirdausy@gmail.com dan carunia_firdausy@yahoo.com.

BIOGRAFI PENULIS

Achmad Sani Alhusain, SE.,MA., Lahir di Cimahi, 11 Mei 1972. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen, Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, tahun 1998. Menyelesaikan *Master of Art in Economic Policy* di *Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, USA*, 2002. Penulis merupakan Peneliti Madya Golongan IV/a dengan bidang kepakaran Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Tulisan yang sudah diterbitkan antara lain berjudul: Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kreatif, Kebijakan Pemerataan Pembangunan Daerah di Indonesia, dan Upah Minimum: Kebijakan, Permasalahan dan Solusi. Penulis juga aktif melakukan berbagai penelitian, pengkajian, dan analisa yang berhubungan dengan isu-isu kebijakan publik serta memberikan pendampingan pada Alat Kelengkapan Dewan dan dalam proses pembentukan Undang-undang yang sesuai dengan bidang kepakaran. Email: sani_alhusain@yahoo.com

Ariesy Tri Mauleny, S.Si.,M.E., Lahir di Palembang, 26 Maret 1975. Penulis adalah Peneliti Muda dengan kepakaran Ekonomi Terapan. Menyelesaikan Sarjana Sains di FMIPA Universitas Indonesia tahun 1997 dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, kekhususan Keuangan Pusat dan Daerah, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2007. Berkarir sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sejak tahun 2010 hingga sekarang. Penulis pernah mendampingi Baleg untuk pembahasan RUU Penjaminan (2015) dan Pansus RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (2014). Penulis juga telah menghasilkan

beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Pemangkasan Anggaran 2016 dan Target Pertumbuhan Ekonomi (2016), Kebijakan PMN dalam Mendukung Perekonomian Nasional (2015), Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Jakarta (2015), Peranan Dana Perimbangan terhadap Sektor Kesehatan (2014), dan Eksistensi Keuangan Negara Menuju Kemandirian Pembangunan di Era Otonomi Daerah (2013). Penulis juga terlibat dalam penelitian kelompok diantaranya dengan topik: PAD (2016), Konektivitas (2015), Evaluasi Pembangunan Daerah (2014); Efektivitas Dana Perimbangan (2013); dan Pembiayaan Perumahan Rakyat (2012). Penulis dapat dihubungi melalui email: ariesy.t.leny@gmail.com atau ariesy.t.leny@dpr.go.id;

Nidya Waras Sayekti, S.E.,MM., lahir di Jakarta 3 Juli 1978, menyelesaikan pendidikan D3 di Politeknik Universitas Indonesia Jurusan Perbankan, S1 di Universitas Mercu Buana Jurusan Manajemen, dan S2 Magister Manajemen di universitas yang sama. Penulis mulai berkarir sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI sejak tahun 2010 hingga sekarang. Penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Kebijakan Utang Luar Negeri Indonesia Dari lembaga Keuangan Global (2015), RAPBN-P Tahun 2014 Minim Fungsi Stimulus (2014), Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan (2014), Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Provinsi Maluku Utara

(2014), dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air: Peran PJT I dalam Menjaga Ketahanan Air dan Pangan di Provinsi Jawa Timur (2013). Penulis dapat dihubungi melalui email: nidya_ws@yahoo.com.

Lisnawati, S.Si.,M.SE., adalah Peneliti Muda dengan kepakaran Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 8 September 1982. Pendidikan S1 Sarjana Sains diselesaikan di FMIPA Universitas Indonesia pada tahun 2005. Pendidikan S2 Ilmu Ekonomi diselesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada Tahun 2008. Bekerja sebagai Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Badan Keahlian DPR RI. Penulis pernah mendampingi Komisi VI untuk pembahasan RUU Perdagangan (2014) dan RUU Koperasi (2012) serta Komisi XI untuk pembahasan RUU *Tax Amnesty* (2016). Penulis juga telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Implementasi Sistem Keuangan Pusat dan Daerah dalam Mendukung Perekonomian Nasional (2015), Kebijakan Ketenagakerjaan (2014). Penulis juga terlibat dalam penelitian kelompok diantaranya dengan topik: PAD (2016), Konektivitas (2015), dan Evaluasi Pembangunan Daerah (2014). Penulis dapat dihubungi melalui email: lisnawati.dpr@gmail.com.

